

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi 1998 merupakan era baru bagi masyarakat yang meminta perubahan mendasar pada mekanisme berjalannya pemerintahan di negara ini. Transparansi baik kebijakan pemerintah maupun keuangan merupakan sesuatu yang dicari oleh rakyat, dan akuntabilitas publik merupakan jalan utama untuk menuju *good governance*. Yang ditakutkan oleh masyarakat pada umumnya adalah bahaya dari korupsi yang disebabkan oleh kurangnya transparansi publik, hal ini menjadi fenomena mendasar jika memang transparansi publik dan kontrol publik tidak berjalan dengan baik.

Namun langkah pemerintah dalam otonomi daerah bukan menjadi langkah kongkrit dalam penyelesaian permasalahan pasca reformasi, hal ini yang menjadikan boomerang bagi pemerintah pusat, karena banyak pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi daerah dinilai gagal. Penyusunan otonomi harus diorientasikan untuk mampu swakelola dan mandiri, otonomi daerah tidak mungkin hanya ditingkat kabupaten tetapi di provinsi sehingga bisa mewujudkan zona ekonomi terpadu (Kadi, 2008:43).

Hal ini terjadi karena banyaknya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata, maka harus ada kompensasi yang mahal karena biaya pembangunan fasilitas publik dan realitanya harus tercermin dalam realisasi anggaran yang baik (Ulum, 2005:87). Dampak lain yang muncul akibat adanya otonomi daerah adalah tuntutan agar pemerintah

daerah bisa bekerja lebih professional sehingga tercipta *good governance*, diharapkan pelayanan publik menjadi prioritas utama selain pembangunan, serta transparansi dan akuntabilitas publik yang terjaga.

Penyusunan otonomi harus dirancang sedemikian rupa agar aliran otoritas dan keuangan sesuai. Saat ini yang terjadi adalah terdapat fenomena yang menyatakan “kepala dilepas Ekor dipegang”, artinya kebijakan dari pusat tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik di daerah, sehingga banyak terjadi kegiatan yang tidak terintegrasi, dan misinya hanya sekedar menghabiskan anggaran (Kadi, 2008:51). Penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan tempat yang mahal bagi oknum dewan untuk berbagi kepentingan, baik itu partai politik, kelompok ataupun kolega yang dititipkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 2. Tentang fungsi DPRD. Salah satu fungsi anggaran adalah sebagai tempat menyalurkan aspirasi rakyat dan direalisasikan dalam RAPBD kemudian disahkan menjadi APBD.

Untuk itu dibutuhkan kesesuaian pengawasan, penggunaan anggaran dengan benar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut PP Nomor 105 Tahun. 1999 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran, yang menjelaskan bahwa:

1. Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan,
2. Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Namun hal yang menjadi tanda tanya besar, apakah fungsi dan profesionalisme anggota dewan dalam pembahasan RAPBD keuangan daerah sudah sesuai seperti yang diamanatkan oleh rakyat ataukah belum. Ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Sebagai contoh terdapat kasus calo anggaran yang terjadi di DPR RI, selama ini bagaikan angin, terasa ada, tapi tak tampak. Kini faktanya semakin terkuak setelah anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati membuka kecurangan para koleganya.

Wa Ode Nurhayati membeberkan bahwa hampir semua anggota Badan Anggaran DPR mengutip 7% - 15% dari anggaran yang dialokasikan untuk perubahan alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) dalam APBN 2011. Dari dana untuk daerah itu, menurut Wa Ode Nurhayati, anggota DPR mendapat Rp 200 juta hingga Rp 500 juta. Akibat praktik percaloan itu, 120 kabupaten kota dan 10 provinsi yang seharusnya mendapat anggaran DPID akhirnya tidak kebagian. Padahal, kata Wa Ode Nurhayati, anggaran itu telah disepakati sebelumnya oleh pemerintah (menteri keuangan) dan Badan Anggaran DPR. Bayangkan 120 kabupaten kota dan 10 provinsi tak kebagian dana penyesuaian infrastruktur daerah 2011. Celaknya, tidak seorang pun anggota DPR dari daerah pemilihan di 120 kabupaten kota dan 10 provinsi itu yang protes. (Syukriy, *Editorial Media Indonesia Rabu, 08 Juni 2011*).

Profesionalisme dalam pembahasan RAPBD didasarkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat bukan memperjuangkan kepentingan pribadinya meskipun adanya latar belakang partai ataupun latar belakang dewan seharusnya

bisa memberikan efek positif guna mengoptimalkan kinerja dewan terutama dalam melaksanakan fungsi penganggaran dan APBN pada hakikatnya merupakan penjabaran dari kebutuhan rakyat bukan kepentingan oknum dewan. Profesionalisme dalam pengawasan anggota dewan dipengaruhi oleh dua yaitu faktor internal yaitu kemampuan intelektual atau bisa seperti kemampuan diri sendiri yaitu yang terkait dengan *personal background* dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar diri seperti lingkungan, partai politik, faktor – faktor kepentingan lainnya yang dapat mempengaruhi kebijakan seseorang dalam mengambil keputusan.

Persamaan dengan Penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh (Winarna dan Murni, 2006). Pengaruh *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Studi Kasus Di Karesidenan Surakarta Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, terletak pada variable *personal background*, *political background*, sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah profesionalisme dalam pembahasan RAPBD oleh anggota DPRD di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Hal ini menjadi sangat menarik apabila dikaji secara empiris mengingat perbedaan variabel dan lokasi daerah penelitian yang baru dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang.

“Pengaruh *Personal Background*, *Political Background* terhadap profesionalisme anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan berikut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *Personal Background* berpengaruh terhadap profesionalisme anggota DPRD dalam pembahasan (RAPBD) ?
2. Apakah *Political Background* berpengaruh terhadap profesionalisme anggota DPRD dalam pembahasan (RAPBD) ?
3. Apakah *Personal Background* dan *Political Background* berpengaruh terhadap Profesionalisme anggota DPRD dalam pembahasan (RAPBD) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaruh dan mencari bukti empiris *Personal Background* berpengaruh terhadap Profesionalisme anggota DPRD dalam pembahasan (RAPBD).
2. Untuk mengetahui pengaruh dan mencari bukti empiris *Political Background* berpengaruh terhadap Profesionalisme anggota DPRD dalam pembahasan (RAPBD).
3. Untuk mengetahui pengaruh dan mencari bukti empiris *personal background* dan *political background* berpengaruh terhadap Profesionalisme anggota DPRD dalam pembahasan (RAPBD).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian ada pun manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah daerah

menjadi masukan atas pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan *good governance*.

2. Bagi DPRD

Sebagai masukan atas penerapan fungsi dewan sebagai mana mestinya dalam rangka pembahasan RAPBD.

3. Bagi Akademisi

Memberikan sumbangsih pemikiran yang ilmiah serta pengembangan literature dalam akuntansi sektor publik dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

4. Bagi Partai Politik

Memberikan masukan agar lebih selektif dalam seleksi calon kader untuk masing-masing partai politik.

5. Bagi penulis

Dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini sebagai berikut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini fokus terhadap DPRD Kabupaten Bangkalan disebabkan perbedaan

objek penelitian dengan penelitian terdahulu serta pengembangan variable dari penelitian terdahulu yang diharapkan bisa menguji seberapa jauh pengaruh antara variable yang diujikan, sehingga dapat dibuktikan secara empiris. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. Alasan dipilihnya seluruh anggota DPRD sebagai responden adalah anggota DPRD terlibat langsung dalam pembahasan RAPBD.